

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keuangan daerah merupakan satu aspek dalam administrasi keuangan yang dikelola sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah yang berdayaguna, bertanggungjawab, bersih dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam menggapai visi misi dan tujuan instansi pemerintahan. Semua itu merupakan persyaratan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan, cita-cita bangsa dan Negara. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di buat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan sebagai operasional daerah. Hal ini juga yang akan menjadi tolak ukur kinerja agar bisa di tanggung jawabkan akhir tahun anggaran. Melalui laporan keuangan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara/Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Anggaran Pemerintah Daerah atau lebih di kenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Anggaran sektor publik yang mencakup faktor perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Dimana dalam proses penyusunan anggaran di sebut dengan penganggaran. Pelaksanaan anggaran belanja akan memberikan implikasi bagi pemerintah dalam melakukan pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja daerah. Dimana efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Efisiensi di lakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang di hasilkan terhadap *input* yang di gunakan. Di katakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat di capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah otonom baru wujud dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu di Provingsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai wilayah luas  $\pm 3.596$  Km<sup>2</sup>, atau sama dengan 4,93 % dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara, mencakup 5 Kecamatan, 52 Desa serta 2 Kelurahan. Kecamatan Kotapinang juga merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berada pada ketinggian 0-100 meter di atas Permukaan Laut (DPL). Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya Kecamatan Kotapinang , di upayakan berbagai cara strategis yang disusun secara terpadu yang berkesinambungan dan di hadapkan pada kondisi keterbatasan kualitas pengelolaan keuangan. Kebijakan akuntansi yang di

gunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan No.39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat Kewilayahan. Dan juga Kecamatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan perumusan, pelaksanaan dan pelaporan aset anggaran yang ada di Kecamatan itu sendiri. Dalam keuangan Kecamatan, Camat sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di Kecamatan.

Pelaksanaan anggaran akan memberikan implikasi bagi pemerintah dalam melakukan pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja daerah. Dimana efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja di upayakan untuk efisien mungkin. Namun nyatanya dalam pengelolaan keuangan tentunya Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan memiliki kendala yang di hadapi, permasalahan mengenai anggaran belanja menjadi hal yang tidak dapat di hindari lagi. Hasil pencapaian dan target menjadi tidak sebanding dengan kinerja keuangan karena tingkat realisasi rendah maupun sebaliknya. Sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai Program/Kegiatan pada Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama satu periode.

Hasil dari observasi awal di temukan data anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan yang terus mengalami tidak sesuai antara anggaran yang di alokasikan dengan realisasi anggaran di lapangan. Dan diperoleh data awal dari Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017-2019 di temukan selisih yang signifikan antara anggaran dan realisasinya, berikut di sajikan pada tabel :

**Tabel 1.1**

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Pada Kecamatan Kotapinang Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	3.359.888.197,00	2.945.244.303,00	87,66%
2018	2.991.454.497,00	3.016.003.878,00	100,82%
2019	6.415.860.597,00	5.933.461,173.00	92,48%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kotapinang tahun 2017-2019

Dijelaskan dari tabel bahwa Anggaran Belanja Kecamatan Kotapinang terlihat dari tingkat presentasi nya di mana anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meski begitu jauh dari tingkat presentasi tidak stabil masih berada dibawah 100% hal ini berarti

membuktikan bahwa belanja daerah selama 3 tahun tersebut masih kurang terealisasi. Seperti tahun 2017 realisasi belanja lebih rendah di bandingkan dengan anggaran belanja sehingga tingkat presentasinya yaitu, 87,66%. Kemudian tahun 2018 anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan selisih sebesar Rp. 368.433.700. Sehingga realisasi anggaran lebih besar dari pada pugu anggaran mencapai 100,82%. Selanjutnya di tahun 2019 anggaran belanja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selisih anggaran sebesar Rp. 3.424.406.100,00 namun realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan anggarannya, dengan presentasi yaitu 92,48%. Dan ditahun ini juga masih kurang terealisasi karena kurang dari 100%.

Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Kotapinang dilihat dari tingkat presentasi realisasinya secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal. Hanya di tahun 2017 realisasi sangat rendah mencapai 87,66%. Hal ini di sebabkan karena ada beberapa Program/Kegiatan yang di anggarkan tetapi tidak terealisasi atau tidak terlaksana dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dalam merealisasi anggaran belanjanya kurang optimal, di antaranya pertama lemahnya dalam perencanaan atau tidak terserapnya anggaran tersebut karena yang di rencanakan dari beberapa Program/Kegiatan ini tidak sesuai dengan yang di inginkan. Adapun waktu dalam pelaksanaan pun menjadi faktor dimana keterbatasan waktu dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kurang sehingga tidak terealisasikan.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Program/Kegiatan yang tidak Terealisasi**  
**Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2019**

Tahun	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2017	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.600.000,00	45.008,00	33,09%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	82.600.000,00	33.899.250,00	41,04%
2018	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	–	0%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	36.400.000,00	8.685.000,00	23,86%
2019	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	–	0%
	Rapat-Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	16.300.000,00	8.340.000,00	51,72%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Kotapinang

Pada tabel 1.2 menunjukkan Program/Kegiatan yang tidak terealisasikan dengan sempurna ditahun 2017-2019 dan tidak terserap dibawah 50% setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dengan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang terserap sebesar Rp. 45.008,00 dengan anggaran

sebesar Rp. 13.600.000,00 dengan tingkat presentasi 33,09% dan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan tingkat presentasi sebesar 41,04%. Di tahun 2018 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 2.200.000,00 dan tidak terealisasi sama sekali. Dan pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran Rp. 6.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.685.000,00 yang hanya terserap 23,86% atau tidak terserap sempurna. Dan pada tahun 2019 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sama sekali tidak terealisasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.200.000,00. Hal ini menjadi faktor pemicu tidak efisien dalam penganggaran belanja dengan realisasinya. Sehingga menjadi kendala tidak terserap anggaran belanja secara efektif.

Realisasi anggaran untuk Program/Kegiatan pada Kecamatan Kotapinang setiap tahunnya rata-rata sudah terealisasikan. Hanya ada beberapa Kegiatan saja yang tidak terealisasikan atau tidak terlaksana dengan sempurna. Penyerapan anggaran belanja yang di sediakan oleh pemerintah daerah akan memberikan dua aspek yang pertama bisa menunjukkan adanya efisiensi anggaran dan kedua jika terjadi selisih kurang maka akan terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran belanja yang kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut karena ada Program/Kegiatan yang tidak terlaksana atau kendala lainnya.

faktor yang menyebabkan dalam merealisasi anggaran belanja kurang optimal, antaranya, pertama lemah dalam perencanaan atau tidak terserapnya anggaran tersebut karena yang di rencanakan dari beberapa Program/Kegiatan ini tidak sesuai dengan yang di inginkan. Adapun waktu dalam pelaksanaan pun menjadi faktor di mana keterbatasan waktu dalam merencanakan dan melaksanakan Program/Kegiatan kurang sehingga tidak terealisasikan. Karena jika ada kegagalan target dalam penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja tersebut. Sehingga dana yang di alokasikan ternyata tidak semuanya dapat di dimanfaatkan. Padahal apabila pengalokasian anggaran bisa efisien maka keterbatasan sumber dana yang di miliki dapat optimal untuk mendanai kegiatan startegis.

Hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja untuk realisasi belanja daerah di kategorikan belum optimal karena masih kurangnya SDM baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yang menunjang tugas Kinerja Kerja Pegawai Kecamatan. Salah satu faktor yang menentukan pemerintahan yang baik atau tidak adalah Sumber Daya Manusia. SDM sangat berpengaruh untuk pengembangan suatu organisasi publik karena citra organisasi akan di nilai dari kinerja Sumber Daya Manusiannya (Pegawai). Oleh karena itu tujuan organisasi akan tercapai dengan baik apabila Pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan efisien.

Mengingat pentingnya analisis efisiensi sebagai alat bantu serta sumber informasi untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja dalam



kinerja organisasi serta prestasi (keberhasilan) suatu organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Efisiensi Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2019**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dikemukakan diatas permasalahan dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan KotaPinang Tahun 2017-2019?
2. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017-2019?
3. Bagaimana Kesesuaian Realisasi Anggaran Belanja dengan Program/Kegiatan?
4. Bagaimana Sumber DayaManusia Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk Mengetahui Tingkatan pengukuran Efisiensi Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan KotaPinang Tahun 2017-2019
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan tahun 2017-2019
3. Untuk Mengetahui Kesesuaian Realisasi Anggaran Belanja dengan Program/Kegiatan
4. Untuk Mengetahui Sumber Daya Manusia Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah;

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperoleh dan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam mengukur Kinerja Sektor Publik yang bersangkutan serta menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan penulis yang diperoleh selama dibangku kuliah.

2. Bagi Dinas Kecamatan kotapinang

Sebagai bahan masukan untuk menelaah keadaan yang positif untuk mengambil masukan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dinas pemerintahan daerah yang lebih baik lagi.

3. Bagi Almameter

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir digunakan dalam suatu penelitian yaitu sebagai upaya dalam penyelesaian masalah agar penelitian lebih tersistem dan terarah. Administrasi Publik di ungkapkan oleh (Pasolong, 2013:8) ialah proses kerjasama yang di lakukan oleh sekelompok orang atau juga suatu lembaga untuk melakukan tugas pemerintah dalam rangka pemenuh kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2011:177) adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat di hitung dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

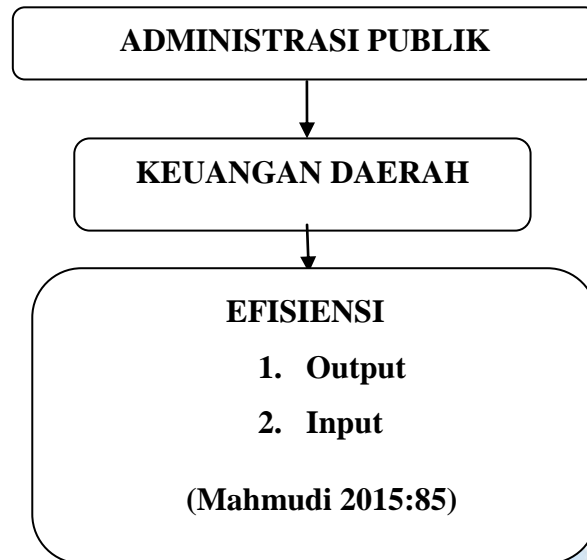
Menurut Mahmudi (2015:85) Efisiensi adalah membandingkan antara *output* dan *input* atau bisa istilah lain *output* perunit *input*. Suatu organisasi, program, atau juga kegiatan di katakan efisiensi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah itu juga. Pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, unggul dan bermartabat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran belanja daerah termasuk dalam faktor penting dari pengelolaan keuangan agar tercapainya tujuan dan fungsi pada Kecamatan Kotapinang. Dengan begitu, penulis merumuskan kerangka pemikirannya sebagai berikut;

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Penulis, 2021)